

# Peningkatan Pemahaman Mengenai Masalah Pendidikan di Wilayah Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Posma Sariguna Johnson Kennedy

Universitas Kristen Indonesia/Universitas Pertahanan, Jakarta, Indonesia

Email: [posmahutasoit@email.com](mailto:posmahutasoit@email.com)

**Abstrak**– Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melihat berbagai permasalahan pendidikan di wilayah perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan melakukan diskusi dalam meningkatkan pemahaman mengenai isu-isu strategis mengenai kesenjangan pendidikan bersama para dosen dan mahasiswa Pasca Sarjana di Universitas Nusa Cendana, Kupang NTT. Metode penulisan paper ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengkaji berbagai literatur dan data-data kuantitatif, serta hasil diskusi yang dilakukan. Pertumbuhan tingkat layanan pendidikan di NTT telah semakin meningkat seiring dengan investasi pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti penambahan jumlah ruang kelas di sekolah menengah atas, sekolah kejuruan dan universitas/politeknik. Namun, peringkat rata-rata pendidikan di NTT masih berada di urutan keempat terendah di Indonesia. Kabupaten dengan kondisi terburuk di perbatasan adalah Malaka. Kabupaten di wilayah perbatasan lainnya, seperti Timor Tengah Utara, Kupang dan Belu menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan kabupaten lainnya.

**Kata Kunci:** Masalah Pendidikan, Nusa Tenggara Timur, Timor Leste, Wilayah Perbatasan Indonesia.

**Abstract**– This activity aims to look at various educational problems in the border area of the Nusa Tenggara Timur Province (NTT) and the Republic of Democratic of Timor Leste (RDTL). Implementing this activity is to conduct discussions to increase understanding of strategic issues regarding educational gaps with lecturers and postgraduate students at Nusa Cendana University, Kupang NTT. The method of writing this paper is to use a qualitative approach by reviewing various literature and quantitative data and the results of the discussions carried out. The growth in the level of education services in NTT has been increasing in line with educational investments made by the government, such as increasing the number of classrooms in senior high schools, vocational schools and universities/polytechnics. However, the average education rating in NTT is still the fourth lowest in Indonesia. The district with the worst conditions on the border is Malacca. Districts in other border areas, such as Timor Tengah Utara, Kupang and Belu, performed better than other districts.

**Keywords:** Education Problems, Nusa Tenggara Timur, Timor Leste, Indonesian Border Region.

## 1. PENDAHULUAN

Disparitas antar daerah menjadi fokus utama dalam kerangka pembangunan daerah di Indonesia saat ini. Hal ini dapat dilihat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional saat ini, yang menyatakan bahwa arah kebijakan utama pembangunan daerah secara nasional difokuskan pada upaya percepatan pengurangan kesenjangan pembangunan daerah dengan mendorong transformasi dan percepatan pembangunan daerah. “Seperti pada wilayah Indonesia Timur yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera” (RPJMN, 2015). Djojohadikusumo mengatakan, “Dua dari tiga masalah pembangunan jangka panjang Indonesia berkaitan dengan masalah ketimpangan, yaitu ketimpangan perimbangan kekuatan antar kelompok masyarakat dan ketimpangan ekonomi antar daerah. Salah satu masalah lainnya adalah masalah lapangan kerja produktif dan pengangguran. Dapat dipahami jika masalah ketimpangan atau disparitas antar wilayah selalu menjadi salah satu masalah utama pembangunan wilayah di Indonesia” (Djojohadikusumo, 1994).

Fenomena *gap* terjadi karena perbedaan alokasi berbagai faktor pertumbuhan ekonomi. Hirschman dalam Nurzaman (2002) menyatakan bahwa, “Disparitas terjadi tidak hanya dalam pembangunan ekonomi antarnegara tetapi juga variasi dalam pembangunan daerah. Jika di dunia ini ada negara maju dan negara terbelakang, maka di suatu negara ada daerah maju dan daerah miskin”. “Asal mula kesenjangan antar wilayah atau disparitas wilayah erat kaitannya dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif keuntungan. Motif ini mendorong sentralisasi pembangunan di daerah

yang menawarkan ekspektasi keuntungan tinggi, sedangkan daerah yang tidak menjanjikan keuntungan tinggi akan tetap tertinggal (Jinghan, 1990)". Williamson dalam Kuncoro (2004) menyatakan bahwa, "Pada tahap awal pembangunan, disparitas atau kesenjangan antar wilayah akan lebih signifikan dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Namun pada tahap pertumbuhan ekonomi yang lebih matang, tampak adanya keseimbangan antar wilayah dan kesenjangan yang berkurang secara signifikan". Williamson secara eksplisit memberikan fokus pada ketimpangan antar wilayah di tingkat pendapatan per kapita, bukan kepada disparitas pendapatan rumah tangga. (Kennedy, 2019)

"Percepatan dan transformasi pembangunan daerah bertumpu pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), peningkatan produktivitas, efisiensi dan nilai tambah sumber daya alam (SDA), penguatan peran ilmu pengetahuan dan teknologi, penyediaan infrastruktur yang terintegrasi dan merata dengan memperhatikan posisi geostrategis regional dan global. Setiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda, oleh karena itu dalam menyusun usulan program/kegiatan yang akan dirumuskan tidak dapat digeneralisasikan dan harus menggunakan pendekatan yang berbeda untuk setiap daerah. Untuk dapat menyusun program/kegiatan yang sesuai dengan isu atau permasalahan daerah, diperlukan kajian yang mendalam dan komprehensif pada masing-masing daerah, terutama yang terkait dengan indikator utama pembangunan daerah." (Bappenas, 2017)

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dikenal sebagai daerah dengan tingkat pendidikan masyarakat yang sangat rendah dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Hal ini harus disikapi karena kualitas SDM akan mempengaruhi cara berpikir dan inovasi masyarakat dalam mengelola SDA dan meningkatkan taraf hidupnya. Dengan begitu program pendidikan perlu ditingkatkan di semua kabupaten, terutama di daerah perbatasan yang terkadang tidak tersentuh sama sekali. "Wilayah perbatasan di NTT didominasi oleh pertanian dan peternakan. Hambatan pengembangan potensi sumber daya alam di wilayah perbatasan yang sering terjadi adalah persoalan rendahnya kualitas sumber daya manusia karena belum optimalnya pelayanan dan peningkatan kualitas SDM. Program terkait pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat perbatasan untuk meningkatkan keterampilan/kemampuan dalam mengelola potensi SDA di wilayah perbatasan masih sangat jarang. Isu kurangnya tenaga pendidik/instruktur di kawasan perbatasan telah menghambat pelayanan dan peningkatan kualitas SDM di masyarakat perbatasan." (BNPP, 2015)

Belum optimalnya pembangunan dan pemanfaatan sarana atau prasarana dasar di kawasan perbatasan merupakan masalah umum yang terjadi hampir di seluruh kawasan perbatasan Indonesia. "Jika kawasan perbatasan dibiarkan terbelakang dan terisolasi, aksesibilitas yang kurang, terutama akses pelayanan publik, menyebabkan kesejahteraan masyarakat menjadi rendah. Kualitas SDM dan persebaran penduduk tidak merata karena karakteristik geografis wilayah juga memberikan kontribusi yang besar. Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi SDA yang tidak terkendali di luar daya dukungnya, menambah rumitnya permasalahan yang dihadapi kawasan perbatasan Indonesia" (Kennedy, 2020). Dari paparan-paparan tersebut perlu dilihat isu atau permasalahan daerah, khususnya masalah pendidikan di wilayah perbatasan Indonesia di Provinsi NTT. Dengan demikian Pemerintah Daerah dapat merumuskan program/kegiatan yang paling sesuai dengan kearifan lokalnya.

## **2. METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan ini dilakukan dengan metode diskusi kelompok, yang dilaksanakan bersama dosen dan mahasiswa. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan di Universitas Nusa Cendana Kupang (Undana), yang merupakan kegiatan diskusi dan tukar pikiran mengenai permasalahan pendidikan yang ada di wilayah perbatasan NTT-RI dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Pelaksanaan dapat dilakukan langsung di lokasi karena dilaksanakan tepat sebelum terjadinya Pandemi COVID-19. Target luaran kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman suatu topik atau suatu permasalahan. Pelaksanaan diawali dengan rapat perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Kegiatan dilakukan dalam 2 kegiatan, yaitu: Kegiatan pertama adalah diskusi dan tukar pikiran yang dilakukan bersama dengan para dosen (berjumlah 10 dosen);

Kegiatan kedua adalah peningkatan pemahaman dan diskusi dengan para mahasiswa Pasca Sarjana Undana (berjumlah 25 mahasiswa).



Gambar 1. Tim di Lokasi, Universitas Nusa Cendana, Kupang

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kawasan Perbatasan Negara adalah wilayah negara yang secara geografis berbatasan langsung dengan negara tetangga, baik di darat, di lautan, maupun di udara. Wilayah perbatasan sangat penting bagi fungsi-fungsi pertahanan dan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan suatu negara. “Provinsi NTT merupakan wilayah yang secara geografis dan demografis berbatasan dengan Timor Leste dan Australia. Lingkup wilayah perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah perbatasan darat, perbatasan laut, dan pulau-pulau terluar, yang meliputi (BNPP, 2015):

- Wilayah perbatasan darat dengan Timor Leste secara administratif meliputi 4 Kabupaten yaitu Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Malaka. Batas darat kawasan perbatasan pada ruas timur terletak di Kabupaten Belu dan Malaka, dengan panjang garis 149,1 km. Batas darat ruas barat terletak di Kabupaten Kupang dengan panjang garis 15 km dan di Kabupaten Timor Tengah Utara dengan garis batas 104,7 km.
- Wilayah perbatasan laut di wilayah NTT dengan Timor Leste secara administratif meliputi 12 Kabupaten, yaitu Kabupaten Kupang, Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Kabupaten Malaka, Kabupaten Alor, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Rote, dan Kabupaten Sabu Raijua. Kabupaten Kupang, Alor, Belu dan Timor Tengah Utara dengan Timor Leste dan Kabupaten Rote Ndao yang berbatasan dengan Australia.
- Pulau-pulau terluar yang dimiliki adalah Pulau Alor di Kabupaten Alor dan Pulau Batek di Kabupaten Kupang yang berbatasan dengan negara Timor Leste; Pulau Ndana di Kabupaten Rote Ndao berbatasan dengan Australia; Pulau Dana di Kabupaten Sabu Raijua dan Pulau Mangkudu di Kabupaten Sumba Timur berhadapan dengan Samudera Indonesia.”

“Kondisi kawasan perbatasan saat ini, secara umum belum mendapat perhatian yang sama. Hal ini terlihat dari minimnya infrastruktur yang tersedia di wilayah perbatasan, sehingga menimbulkan banyak masalah seperti perubahan batas wilayah, penyelundupan barang dan jasa serta kejahatan lintas negara. Kondisi umum perekonomian di wilayah perbatasan antara lain sebagai berikut (Maulana, 2010):

- Lokasinya relatif terpencil dengan tingkat aksesibilitas yang rendah.

- Rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat.
- Rendahnya tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat perbatasan.
- Kurangnya informasi tentang pembangunan pemerintah dan masyarakat di kawasan perbatasan.”



Gambar 2. Diskusi dengan Wakil Rektor IV, Universitas Nusa Cendana, Kupang

Pendidikan merupakan salah satu bidang pembangunan yang fundamental karena berkaitan dengan penyiapan pengembangan SDM yang berkualitas. “Pembangunan diarahkan untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan yang unggul dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat pada setiap jenjang pendidikan. Selain itu, pengembangan pendidikan juga perlu diarahkan pada peningkatan kualitas dan relevansi pelatihan dengan perkembangan dunia usaha” (Maulana, 2010).

Pertumbuhan pelayanan pendidikan di NTT semakin meningkat seiring dengan investasi pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah. “Seperti penambahan jumlah ruang kelas di sekolah menengah atas, sekolah kejuruan, dan universitas/politeknik. Selain itu, terjadi peningkatan jumlah ruang kelas dan laboratorium di universitas/politeknik pada tahun. Sektor utama yang mengalami percepatan adalah administrasi pemerintahan dan layanan pendidikan. Namun, rata-rata peringkat pendidikan di NTT masih terendah keempat di Indonesia.” (Bappenas, 2017)



Gambar 3. Diskusi dengan Dekan dan para Dosen Pasca Sarjana, Universitas Nusa Cendana, Kupang

Dari hasil diskusi, kabupaten di wilayah perbatasan dan pendukungnya yang perlu mendapat perhatian besar terkait dengan masalah pendidikan adalah Kabupaten Malaka. Wilayah yang perlu perhatian sebagai prioritas berikutnya adalah Kabupaten Kupang dan Belu yang berbatasan dengan Negara Timor Leste. “Permasalahan yang dihadapi dalam bidang pendidikan yang perlu ditangani dengan baik di wilayah perbatasan NTT adalah (Bappenas, 2017):

- Sarana dan Prasarana: Kurangnya fasilitas penunjang seperti perpustakaan, ruang serba guna, laboratorium, dan ruang olahraga; Bangunan sekolah perlu segera diperbaiki karena sebagian besar kondisinya tidak layak untuk digunakan dalam proses belajar mengajar ; Kurangnya buku untuk menunjang kelancaran proses pembelajaran sehingga siswa mendapatkan lebih sedikit buku sebagai bahan referensi.
- Pendidik: Kurangnya guru yang berkualitas untuk setiap mata pelajaran; Kualitas guru tidak cukup.
- Peserta didik: Keterbatasan kemampuan masyarakat untuk membiayai pendidikan anaknya, karena rendahnya tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat perbatasan di pedalaman dan pulau-pulau kecil terluar. Akibatnya, anak usia sekolah seringkali lebih diberdayakan oleh orang tuanya untuk membantu pekerjaannya mencari uang; Kemampuan dan keterampilan siswa jauh dari yang diharapkan, karena keterbatasan fasilitas dan tenaga pendidik.
- Manajemen sekolah: Manajemen sekolah masih belum optimal, dan masih kurangnya keterampilan dan pengetahuan dalam pengelolaan sekolah.
- Partisipasi masyarakat: Kurang optimalnya keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan kemitraan untuk meningkatkan kinerja sekolah. ”



Gambar 4. Diskusi dengan Mahasiswa Pasca Sarjana, Universitas Nusa Cendana, Kupang

#### **4. KESIMPULAN**

Dalam pembangunan pendidikan di wilayah perbatasan NTT perlu memperhatikan berbagai faktor yang menjadi prioritas utama. Diantaranya adalah faktor internal yang berkaitan dengan efektifitas proses belajar mengajar yang ternyata sangat tergantung pada ketersediaan fasilitas pembelajaran, kualitas dan kuantitas, metode pengajaran dan manajemen pendidikan. Selain itu faktor eksternal juga harus diperhatikan, yang melibatkan peran orang tua, masyarakat dan pemerintah yang mendukung pengembangan pendidikan yang berkualitas. Yang terpenting adalah peningkatan sumber daya manusia itu sendiri, yaitu para pendidik dan peserta didik.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat dilaksanakan dengan baik. Penulis dan tim mendapat sambutan antusias dan ramah dari para dosen, mahasiswa dan pimpinan Universitas Nusa Cendana Kupang. Diskusi dan tukar pikiran mengenai permasalahan pendidikan di wilayah perbatasan NTT berlangsung penuh keakraban dengan saling tukar menukar informasi dan pengetahuan. Pemberian pemahaman kepada mahasiswa juga diikuti dengan semangat, terlihat dari banyaknya pertanyaan yang dilontarkan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan ini dapat terselenggara berkat Program Simlitabmas dari Pemerintah dan LPPM-UKI. Penulis juga berterima kasih kepada Pasca Sarjana Universitas Nusa Cendana Kupang, dan pihak-pihak lain yang telah membantu.

## REFERENCES

- Bappenas. (2017). *PraDA Profil dan Analisis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2017*. Jakarta: Kedepuitan Bidang Pengembangan Regional, 2017, hlm.1-40.
- BNPP. (2015). *Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2015* Tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019, Jakarta.
- Djojohadikusumo S. (1994). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES.
- Jinghan, M.L. (1990). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Penerjemah D. Guritno, Jakarta: Rajawali Pers.
- Kennedy P.S.J, Tobing S.J.L., Heatubun A.B., Toruan R.L. (2018). "Strategic Issues of Indonesian Border Area Development Based on The Master Plan 2015-2019", *Proceeding International Seminar on Accounting for Society*, Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang , hal.190-198.
- Kennedy P.S.J, Tobing S.J.L., Toruan R.L. (2019) "Study of Educational Thematic Data in the Indonesian Border Region in Nusa Tenggara Timur Province", *American Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. 4(1): 98-110.
- Kuncoro, Mudrajad. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Yogyakarta: Erlangga, 2004.
- Maulana, Firkan. (2010). *Input Paper RPJMN II 2010-2014 Pengembangan Kawasan Perbatasan*. Jakarta: Fasilitas Pendukung Desentralisasi.
- Nurzaman, SS. (2002). *Perencanaan Wilayah di Indonesia Pada Masa Sekitar Krisis*, Bandung: ITB, Bandung.
- RPJMN. (2015). *Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015* Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 Republik Indonesia, Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, Jakarta.